

**PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ISMUNITA

NIM : 10400114075

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Wassalamu'alaikum Warahnatullahi Wabarakatuh.

Samata, 12 November 2018

Penyusun

ISMUNITA

NIM: 10400114075



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar” yang disusun oleh Ismunita Nim: 10400114075, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah disetujui dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan beberapa perbaikan.

Samata-Gowa, 26 November 2018 M
14 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, SH.,M.Th.I	(.....)
MunaqisyII	: Ashar Sinilele, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Andi Safriani, S.H, M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN AlauddinMakassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NID 162 1016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam dan shalawat tak lupa kami kirimkan kepada baginda Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Sembah sujud kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, pembimbing hidupku, Ayahanda **Muh. Amir. H** dan Ibunda **Fitri** atas segala cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan sejak kecil sampai saat ini, doa semangat serta kerja keras mereka yang membuat penulis bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dengan rasa bangga dan haruh saya

juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara serta sahabat-sahabat saya, atas segala bantuan, dorongan/ semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, dan terimakasih juga untuk keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu melalui tulisan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bersama, Prof. Dr. Mardan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Hj. SitiAisyah, M.A Ph. D, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Prof Hamdan, Ph.D, selaku Wakil Rektor bidang Kerjasama, yang telah memimpin UIN Alauddin Makassar yang menjadi tempat penulis memperoleh ilmu, baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Istiqamah, S.H.,M.H. dan Rahman Syamsuddin, S.H,M.H masing-masing ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum.

4. Ahkam Jayadi, S.H, M.H dan Dr. Andi Safriani, S.H, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang telah memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan serta Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Aparat Kepolisian yang telah membantu serta semua pihak yang telah
7. memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum B Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2014.
9. Sahabat seperjuangan yang telah saya anggap sebagai saudara sendiri (Risna Nasir dan Sri Wahyuni). Yang mau berbagi suka duka, canda tawa.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, (Ramos, Mahfud, Wahida, Pite, dan Naylah) yang merupakan teman seperjuangan dan sering memberikan semangat beserta do'anya.
11. Seluruh pihak yang tidak disebut satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan bimbingan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat adanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Samata , 12 November 2018

Ismunita
10400114075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
E. Kajian Pustaka.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	16
A. Tinjauan Umum Tentang Propam.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	25
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
E. Tinjauan Tentang Disiplin dan Kode Etik Polri.....	39
F. Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data	49

E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN	
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN	
MAKASSAR	
A. Profil Lokasi Penelitian	52
B. Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap	
Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana.....	57
C. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di	
Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

ABSTRAK

NAMA :ISMUNITA

NIM : 10400114075

**JUDUL : PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR**

Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum di Polres Pelabuhan Makassar dalam bidang penegakan kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu siding disiplin dan/ atau siding Kode Etik Profesi Polri.

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan.yang dilakuan oleh anggota Polri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:² a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) Negara didasarkan pada teori trias politica, c) Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*), d) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 346.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 152

terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*). Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan.

Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeratan bagi si pelanggar hukum. Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadialuran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.³

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya.

³Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 1-3.

Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi.

Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia.

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan normahukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang

disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :⁴

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Hukum di Indonesia masih jauh dari kata kesempurnaan jika dibandingkan dengan Negara- negara yang telah maju dan berkembang, Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga

⁴Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. ALUMNI, 2003), h. 32.

negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi tetap saja dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri, serta tunduk pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota Polri mempunyai tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri NO.14 tahun 2011, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam PP NO. 2 Tahun 2003, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam

⁵Redaksi Sinar Grafika, *UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.8.

berprilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 5 huruf a PP NO.2 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Peraturan Kapolri NO. 14 Tahun 2011).

PROPAM adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama

penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bagi penulis sangat diharapkan memberikan masukan yang signifikan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana.
2. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham mengenai peranan propam dalam penegakan hukum, serta penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat member masukan, gambaran, atau menambah wawasan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi masukan bagi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu: Peranan Propam dalam penegakan hukum, serta penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka ada beberapa kata yang digunakan dalam judul ini yang perlu penulis berikan penjelasan mengenai kata-kata yang dianggap penting yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Peranan, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Teori peranan

Peranan (role) berasal dari kata peran, menurut kamus besar bahasa Indonesia “peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa”.⁶ Menurut Kozier Barba peran adalah seperangkat tingkahlaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya terhadap suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang diperankan

⁶W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1986).

dalam kehidupan bermasyarakat, peran yang dimiliki seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat.
 2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat.
 3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- b. Propam adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.
- c. penegakan hukum

Teori penegakan hukum

Dalam era globalisasi ini kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Hukum yang baik dapat tercipta jika penegak hukumnya juga baik, penegakan hukum yang baik juga tergantung pada aparat penegaknya. Dengan kata lain penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari seluruh pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

d. Anggota kepolisian Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸.

e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Teori tindak pidana

Istilah perbuatan pidana kita samakan saja dengan tindak pidana atau delik pidana. sebab beberapa literatur hukum pidana istilah-istilah tersebut banyak dipakai. Definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Van Hamel* delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, menurut *Simons* delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditia Bakti 1998), h.8.

⁸Redaksi Sinar Grafika, *UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3.

perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

j. Wilayah hukum adalah suatu daerah tertentu yang diberikan atau dilimpahkan wewenang untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku¹⁰.

k. Polres Pelabuhan Makassar adalah suatu keseluruhan satuan Organisasi Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedudukannya berada di wilayah Kota Makassar.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa tulisan yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Skripsi Christina Magdalena, yang berjudul “Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak.”¹¹ Dalam Jurnal ini membahas tentang peranan Propam dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta hambatan yang ditemui oleh propam

⁹IsmuGunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h.37.

¹⁰<https://media.neliti.com>, (16/9/2018, 10:12 PM).

¹¹Christina Magdalena, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak*, skripsi Fakultas Hukum, 2014.

dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor Siak.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Christina Magdalena memfokuskan pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, dan menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian yuridis empiris.

2. Jurnal Nozel Saparingka, yang berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”.¹² Dalam jurnal ini membahas tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana dan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nozel Saparingka memfokuskan pada penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana dengan menggunakan metode Hukum Normatif sedangkan penelitian ini memfokuskan pada Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian yuridis empiris.

3. Skripsi Siti Elminawati, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (studi kasus Polda Sulawesi Tengah)

¹²Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Siti Elminawati lebih memfokuskan pada tindak pidana kesusilaan dengan mengambil studi kasus di Polda Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peranan propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Tindak pidana dengan mengambil studi kasus di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.

4. Jurnal Wika Tridingtias, yang berjudul Pertanggungjawaban pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Wika Tridingtias lebih memfokuskan pada Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh oknum Polri dengan metode penelitian Yuridis normatif, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada peranan Propam dalam Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan metode penelitian Yuridis Empiris.¹³

5. Skripsi Anugrah Ryandra Fahlevi, yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Ryandra Fahlevi memfokuskan pada penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian

¹³ Wika, Tridingtias, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum POLRI*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013.

yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.¹⁴



¹⁴Anugrah, Ryandra Fahlevi, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Propam

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor.Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan satuan fungsi dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI

2. Tugas Propam

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya

Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos).

- a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

3. Kewajiban Propam

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri meliputi:

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi Propam;

5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan /laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan /pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan

pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sebuah aturan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Hukum adalah aturan yang memayungi kita dari adanya penyalahgunaan terhadap kekuasaan, alat yang bisa digunakan untuk menegakan atau mencari keadilan. Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu system, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan

¹⁵ <https://propam.polri.go.id>, (15/9/2018, 9:33 AM).

kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹⁶

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu.¹⁷

2. Fungsi Hukum

Sama halnya dengan pembahasan akan tujuan hukum, pembahasan mengenai fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.

J.P Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;

¹⁶Fadli Andi Natsif. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

¹⁷Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Binacipta)

e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi diatas¹⁸

Rudolf Von Ihering Darji Darmo diharjo dan Sidhartamengatakan bahwa hukum mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. fungsi hukum sebagai sarana sosial control
- b. fungsi hukum sebagai “a Tool of Social Engineering”
- c. fungsi hukum sebagai symbol
- d. fungsi hukum sebagai alat politik
- e. fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa
- f. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial
- g. fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial.¹⁹

3. Tujuan Hukum

Tujuan Hukum pada hakekatnya tidak hanya sekedar melindungi kepentingan masyarakat akan tetapi mengabaikan kepentingan individu, atau sebaliknya yakni: tidak hanya mementingkan perlindungan terhadap individu akan tetapi mengabaikan kehidupan masyarakat. Tujuan hukum dititikberatkan kepada perlindungan terhadap kedua-duanya secara serasi, selaras dan seimbang. Apabila kondisi ini terwujud, maka masyarakat akan menjadi aman, tenteram dan damai.²⁰

¹⁸ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Cet, I, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.2

¹⁹ Ashadie Zaeni, dan Arief rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal.124- 131.

²⁰ Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 62.

4. Pandangan Islam Tentang Hukum

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sumber utama bagi ketentuan hukum, di atur dalam QS. An-Nisa ayat 105

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-qur'an terdiri dari ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan untuk umat manusia.

²¹Yayaasan Wakaf Al-Qur'an Suara Hidayatullah, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: PT. Lentera Jaya Abadi, 2011), h.96.

5. Pengertian Hukum Pidana

pidana materil mengatur syarat yang menimbulkan hak penuntutan atau menghapuskan hak itu, begitu pula hukumannya, dengan kata lain mengatur terhadap siapa, bilamana dan bagaimana hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara menjalankan hak penuntutan; dengan kata lain menetapkan tata cara mengadili perkara pidana.²²

6. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).²³

7. Dasar Memberikan Hukuman

Sebelum abad ke- 18, para hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang di ancam dengan hukuman berupa siksa badan.²⁴

Hukum pidana terbagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut Prof. Moeljatno Hukum pidana adalah bagian dari

²²RahmanSyamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal 1-2.

²³IsmuGunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2014), hal.16.

²⁴Gunadi Ismu dan Joenadi Efendi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal.9.

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dalam ketentuan pidana (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*).

Bagian ke-1 dan ke-2 masuk dalam lingkup substantive Criminal Law/hukum pidana materil. Selanjutnya untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut kita menggunakan *Criminal Procedure*/Hukum acara pidana yang juga dikenal dengan hukum pidana formil termasuk dalam hukum publik.

Hukum menurut sesuka hatinya saja dengan arti biarpun tidak ada undang-undang yang dapat mempersalahkan orang itu kalau hakim sudah menganggap bahwa orang itu bersalah maka hakim pun menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Jadi pada waktu itu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dikenal dengan istilah hukuman yang arbitrair.

Menurut pendapat beberapa ahli ilmu hukum, pengaruh pelajaran Montesquieu-lah yang telah mendorong diadakannya perubahan dalam

cara hukuman yang seperti itu, begitulah yang diterangkan oleh Van Apeldoorn dan Utrech dalam bukunya masing-masing.

Dan semenjak itu, menjadi suatu pendirian dasarlah dalam hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan kesalahan, apabila sebelum dia melakukan kesalahan itu tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan hukuman. *Nullum dilectum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Dan dasar inipun tercantum pula dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana di Indonesia. dengan adanya dasar ini dapatlah terjamin keamanan hukum penduduk daripada tindakan sewenang-wenang hakim.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian kepolisian

Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁵Abdoerrauuf, *Al Qur-an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.153.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

²⁶Redaksi Sinar Grafika, *UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.8.

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari, dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

4. Tujuan kepolisian

Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

5. Anggota Kepolisian

a. Pengertian Anggota kepolisian

Menurut UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

1. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan
2. Pegawai negeri sipil

Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pengertian pegawai negeri dirumuskan pada Bab I pasal 1 Sub.a. yakni: Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

- c. pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

a. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan yang di lakukan antara baik dan buruk di adakannya tindakan (*maatregel*) dalam system sanksi KUHPid adalah akibat pengaruh kriminologi. Tindakan dalam KUHPid terdiri dari:

1. Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
2. Hukuman bersyarat.
3. Penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun.

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16(enam belas) tahun, hakim dapat menentukan salah satu dari kemungkinan, yaitu (Pasal 45 KUHPid).²⁸

b. Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah

²⁷Victor MSitumorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Rineka Cipta,1994), h.19-20.

²⁸ KUHP & KUHP, Surabaya:Sinarsindo Utama,2015

yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Menurut Moeljatno, kalau “straf” diartikan “hukuman”, maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsure-

unsur dan ciri-ciri, yaitu; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁹

2. Teori dan tujuan ppidanaaan

Teori ppidanaaan yang digunakan adalah teori yang lazim di kenal di dalam system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relative, dan teori gabungan.

a. Teori absolute

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau yang menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam

²⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 185-186.

terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Adapun lima ciri pokok dari teori absolut menurut Karl O. Christiansen, yakni:

1. Tujuan pidana hanyalah sebuah pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
4. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku;
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaanyang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori relative

Prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*)

khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁰

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 186-191.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.³¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan

³¹Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 15.

kejahatan pidana itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan di atas tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsure yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku /perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. unsur tingkah laku;
2. unsur melawan hukum;
3. unsur kesalahan;
4. unsur akibat konstitutif;
5. unsur keadaan yang menyertai;
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. unsur objek hukum tindak pidana;
10. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.³²

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan ancaman perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*

³²Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 79-82.

commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama /berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkeltvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengetelde delicten*).³³

5. Subjek dari tindak pidana

Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya. Untuk itulah, dari manusia hukum berasal dan dijalankan. Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan. Tetapi pada perkembangannya subjek dari tindak pidana ini tidak hanya manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam buku I pasal 120 rancangan KUHP tahun 1987/1988 diberi pengertian sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan”.³⁴

E. Tinjauan Tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri

1. Pengertian Disiplin dan Kode Etik

a. Pengertian Disiplin

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 121-122.

³⁴ IsmuGunadi, dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hal.49-50.

b. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu kelompok tertentu, dan mempunyai sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau menyimpang dari kode etik tersebut.

Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui ‘training’ atau pengalaman lain bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau member nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.³⁵

2. Dasar Hukum Tentang Disiplin dan Kode Etik Kepolisian

Berdasarkan UU NO 22 tahun 2002 tentang kepolisian

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonsia diatur dengan Keputusan Kapolri.

³⁵E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*(Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), h.33.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.³⁶

Dasar hukum tentang Disiplin anggota Polri di atur dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonsia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

(1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002),Sinar Grafika, Jakarta,2009

- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:

- a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
- b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
- c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggaran disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan pengujian kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Penegakan Hukum dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang penegakan hukum dan keadilan, salah satunya dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' Ayat 135, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa), kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan.”³⁷

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan kepada orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah sekalipun itu terhadap ayah ibu maupun kerabat, dan tidak pilih kasih hanya karena perbedaan antara si kaya dan si miskin karena sesungguhnya Allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatannya, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jangan memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, karena Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan.

Adapun keterkaitannya dengan judul yang diangkat yakni: “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana” yaitu sebagai orang-orang mukmin dan para penegak hukum diperintahkan untuk menegakkan keadilan sekalipun itu yang melanggar atau yang melakukan tindak pidana adalah keluarga atau kerabat dekat, tanpa pilih kasih hanya karena ia kaya atau karena jabatannya sebagai seorang anggota Polri,

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan

dan diperintahkan untuk selalu menegakkan kebenaran, dan jangan memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi karena sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Hadis tentang penegakan hukum dan keadilan salah satunya yaitu:

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau menceritakan,

مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أَنْ فَرِيضًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا أَيُّهَا النَّاسُ، «: ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ «الْحَدَّ، وَابْتَغَى اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).

Ketika menjelaskan hadits ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ”Inilah keadilan”. Inilah penegakkan hukum Allah, yaitu bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersumpah, jika

Fatimah binti Muhammad mencuri –dan Fatimah tentu lebih mulia secara nasab dibandingkan dengan wanita bani Makhzum tersebut karena Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga- maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri yang akan memotong tangannya.”

Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah melanjutkan,”Demikianlah, wajib atas pemimpin (pemerintah) untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Mereka tidak boleh memihak seorang pun karena hubungan dekat, kekayaannya, kemuliaannya di masyarakat (kabilah/sukunya), atau sebab lainnya” (*Syarh Riyadhhus Shalihin*, 1/2119, Maktabah Asy-Syamilah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, dengan melakukan penelitian dengan memilih penelitian di Wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

³⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber.yang diperoleh langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primeryaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library risearch*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel internet, serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis temui dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. wawancara dilakukan dengan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara ke narasumber³⁹. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Bripka Romianto yang menjabat sebagai Kaminal Si Propam dan Bripka Indra Pratama yang Menjabat sebagai Baur Gakkum Si Propam Polres Pelabuhan Makassar.

³⁹<https://id.m.wikipedia.org>, (16/9/2018,12:16 PM).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, agenda dan lain-lain untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul peneliti.

E. Instrumen Penelitian

Merupakan kualitas sebuah hasil penelitian yang berangkat dari kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Pengolahan data yang dimaksud adalah data yang di peroleh kemudian dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis akan melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan- peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.



BAB IV

PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN MAKASSAR

A. Profil Lokasi Penelitian⁴⁰

1. Sejarah Singkat Polres Pelabuhan Makassar

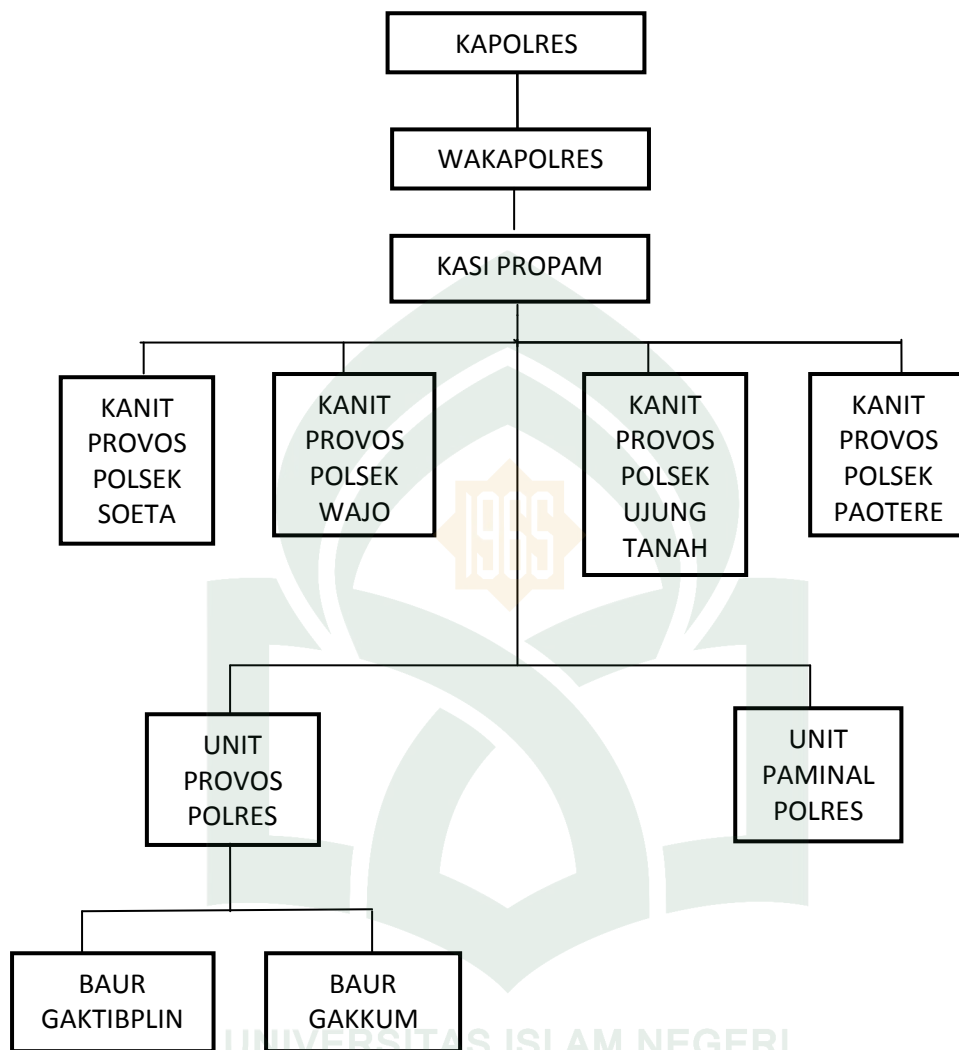
Awal pembentukan Polres Pelabuhan Makassar yaitu awal dimulai satuan kerja yang berada di bawah Polda yaitu KP3 (Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Makassar). Pada bulan Oktober 2010 terbit PERKAP nomor 23 Tahun 2010, maka berubah nominkelatur KP3 Makassar menjadi Polres Pelabuhan Makassar, kemudian dibawah satuan kerja Polrestabes Makassar. Alasan KP3 Makassar Menjadi Polres Pelabuhan Makassar dikarenakan faktor kebutuhan organisasi, untuk memperluas wilayah naungan Polres Pelabuhan Makassar.

2. Letak Geografis Polres Pelabuhan Makassar

Polres Pelabuhan Makassar berada di sebelah Barat berbatas Selat Makassar, sebelah Timur berbatas Kec.Bontoala, sebelah Utara berbatas Kec.Tallo, sebelah Selatan berbatas Kec. Ujung Pandang dengan luas wilayah 16,58 KM2 daratan dan Pulau, terdiri dari 2 Kecamatan, 20 Desa/Kelurahan dan 8 Pulau (dengan jumlah penduduk 96.215 Jiwa yang terdiri dari WNI berjumlah 90,5%, WNI KTRN berjumlah 9,55% yang rata-rata bermatapencarian nelayan, buruh kasar dan pedagang.

⁴⁰ Administrasi Polres Pelabuhan Makassar.

3. Struktur Organisasi Si Propam Polres Pelabuhan Makassar



Struktur Organisasi Si Propam Polres Pelabuhan Makassar, Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar bernama AKBP Aris Bachtiar, SH, SIK, Wakapolres Kompol Ronald S, SH, M.Th, Kasi Propam Ipda Mirwan Herlambang, Kanit Provos Polsek Soeta Ipda Samsu, Kanit Provos Polsek Wajo Ipda ABD.Azis, Kanit Provos Polsek Ujung Tanah Aiptu Thamrin, Kanit Provos Polsek Paotere Aiptu Hasrianto Syarif L, Unit Provos Polres

terbagi atas dua bagian yaitu: Badan Urusan Penegak Ketertiban dan Disiplin (BAUR GAKTIBPLIN) Aiptu Alkon P, dan Bripka Isprianto, Badan Urusan Penegak Hukum (BAUR GAKKUM) Bripka Muhtar, Bripka Indra Pratama, dan Bripka Aris L. Allo, Unit Paminal Polres, Aipda Irwan A, dan Bripka Romianto

Dalam Kepolisian terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. SOP juga merupakan serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Gareth R. Jones juga mengemukakan bahwa SOP merupakan bagian dari peraturan tertulis yang membantu mengontrol perilaku anggota organisasi. SOP mengatur cara pekerja untuk melakukan peran keorganisasiannya secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.⁴¹ Kemudian pada lingkungan kepolisian istilah lain SOP biasa disebut Prosedur Tetap (Protap).

Adapun tugas SIPROPAM berdasarkan wawancara dengan Bripka Romianto yaitu:

⁴¹Gareth R. Jones, *Organizational Theor, Text, and Cases* (2010).

1. SI Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres;
2. SI Propam bertugas melaksanakan pembinaan dan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri melaksanakan sidang disiplin dan/kode etik profesi serta rehabilitasi personil;
3. Dalam melaksanakan tugas, SI Propam menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpanan perilaku dan tindakan personil;
 - b. Menegakkan disiplin, Ketertiban dan/atau pengaman internal;
 - c. Pelaksanaan sidang disiplin, dan/atau kode etik profesi Polri;
 - d. Pengawasan dan Penilaian terhadap anggota personil Polri yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin atau kode etik Profesi polri;
 - e. Penertiban Rehabilitasi personil Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau kode etik profesi Polri.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Indra pratama terkait masalah SOP kepolisian khususnya di Polres Pelabuhan makassar yaitu

⁴²Bripka Romianto, (Unit paminan polres pelabuhan Makassar, wawancara tanggal 8 November 2018).

pada masing- masing bagian dari Kepolisian tersebut memiliki SOP tersendiri, seperti SOP bagian Provos yaitu ketika ada ada pengaduan, maka Paminal yang bertugas melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti-bukti, benar tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilaporkan, setelah itu Paminal membuatkan laporan hasil penyelidikan apakah pelanggaran yang dilakukan cukup bukti atau tidak, ketika cukup bukti maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan Provos melakukan pemeriksaan sampai pada proses persidangan dan tahap putusan.

Seksi Propam Polres Pelabuhan Makassar terdiri dari 2 unit yaitu sebagai berikut:

- a. Unit provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakkan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/ Kode Etik Profesi Polri, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode Etik Profesi.
- b. Unit Paminal, bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakkan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitas personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau Kode Etik profesi.⁴³

⁴³Bripka Indra Pratama, (Unit Provos Polres Pelabuhan Makassar, Wawancara tanggal 8 November 2018).

Tujuan SOP penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri yaitu:

- a. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar (SOP) penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri guna terwujudnya persamaan visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam memberikan pelayanan pengaduan Propam Polri kepada publik, sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran serta memudahkan dalam pelaksanaannya;
- b. Untuk dijadikan pedoman bagi anggota Si Propam dalam melakukan proses penegakkan pelanggaran disiplin dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan tindakan anggota Polri yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

B.Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar

Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama dalam penegakan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dalam lembaga Kepolisian Propam yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu peranan Propam sangat

dibutuhkannya terwujudnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres Pelabuhan Makassar sudah berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni:

Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. rehabilitasi personel.

3. Pembinaan/penyelenggaraan pembinaan penegakan disiplin dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran disiplin dan Kode Etik di Wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. berdasarkan data selama tahun 2017 ada 9 oknum anggota Polisi yang terkait pelanggaran

disiplin , dan 9 orang oknum tersebut telah mengikuti sidang Kode Etik adapun jenis pelanggaran yaitu pada umumnya karena tidak masuk kantor, dan 1 diantaranya yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat. adapun sanksinya yaitu berdasarkan PP No 2 Tahun 2003 yaitu berupa teguran lisan, penundaan kenaikan gaji berkala; . penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; . penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yaitu

1. Keimanan

Lemahnya iman seseorang sangat mempengaruhi rentang terjadinya tindak pidana, karena lemahnya keyakinan bahwa segala perbuatan yang dilakukan itu selalu diawasi dan perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendapat ganjaran di akhirat kelak oleh Allah SWT.

2. Kerjasama Masyarakat

Kurangnya kerjasama dari masyarakat juga merupakan salahsatu factor terjadinya tindak pidana oleh oknum Polri, karena kurangnya masyarakat yang mau melaporkan langsung ketika mengetahui terkait adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Polisi.

3. Teknologi

Diera Modern ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, hal ini juga mempengaruhi mudahnya seseorang melakukan tindak Pidana.

4. Jabatan

Polisi merupakan salah satu Profesi yang memiliki nilai tinggi dimata masyarakat, dengan adanya jabatan yang tinggi juga mempengaruhi terjadinya penyelewengan dengan melakukan tindak pidana.

5. Status Keluarga

Dengan adanya status kekeluargaan sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, karena pada umumnya tidak ada istri Polisi yang ingin melaporkan ketika mengetahui suaminya melakukan tindak pidana.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Wilayah hukum Polres Pelabuhan khususnya pihak Propamyaitu;

1. Meningkatkan Pengawasan terkait kedisiplinan Anggota Polri
2. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap semua anggota kepolisian tentang tidak melakukan tindak kekerasan baik dalam tugas maupun diluar tugas,
3. Melakukan kegiatan yang menyangkut keagamaan,
4. Melakukan terjuan lapangan langsung dan melihat bentuk pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
5. Melakukan inspeksi rutin terhadap setiap anggota kepolisian.

C.Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar

1. Aturan yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana antara lain:

a. Pelanggaran Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri.

b. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

c. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat, laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal maupun Sub Bidang Provos. Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh Kesatuan Reserse Kriminal, setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Provos. Selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidang di Pengadilan, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat sipil lainnya. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya⁴⁴, karena Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk

⁴⁴Bripka Indra Pratama, (Unit Provos Polres Pelabuhan Makassar, Wawancara tanggal 8 November 2018).

nama institusi Polri maka Ankom yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik.

3. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar Disiplin berdasarkan PP No 2 Tahun 2003, yakni:

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indone

Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang

melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode Etik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yang melakukan Tindak Pidana yakni:

1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
3. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana Bagi Anggota Polisi di Polres Pelabuhan Makassar yaitu, Selain Aturan yang mengikat, Pimpinan Polisi baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan penekanan terhadap anggota Kepolisian di Polres Pelabuhan Makassar

agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian pembahasan tentang Pelaksanaan Peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan proses Penyelesaiannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Pelabuhan Makassar dalam bidang pelayanan, penegakan kedisiplinan, ketertiban, dan pengamanan internal sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan peranan dalam penegakan hukum sudah terlaksana akan tetapi belum optimal, ditandai dengan masih ada saja tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi, adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu dengan melakukan kegiatan menyangkut keagamaan, meningkatkan pengawasan dalam hal kedisiplinan anggota Polri, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan tindak pidana.
2. Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar melalui berbagai proses yaitu: penerimaan laporan/ pengaduan yang dapat melalui Dir Reskrim atau melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Apabila telah

dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk nama institusi Polri maka Ankom yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011.

B. Implikasi Penelitian

1. Agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan Polres Pelabuhan Makassar serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana.
2. Pihak Kepolisian khususnya Propam untuk turun langsung ke masyarakat melakukan penyuluhan agar masyarakat melaporkan ketika melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian khususnya di Polres Pelabuhan Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
 Abdoerrauuf. *Al Qur-an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ashadie Zaeni, dan Arief rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditia Bakti 1998.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- E Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Fadli Andi Natsif. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Gunadi, Ismu dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media 2014.
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Kusumaatmaja Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Binacipta.
- Magdalena Christina, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak*, skripsi Fakultas Hukum 2014.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mulyyana. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.
- Poernomo, Bambang *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP* Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.3 th.2002)*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI, 2003.

- Saparingka Nozel, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.
- Situmorang, Victor.M. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Syamsuddin, Rahman, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Cet, I Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1986.
- Yayaasan Wakaf Al-Qur'an Suara Hidayatullah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: PT. Lentera Jaya Abadi, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

- KUHP & KUHP, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *tentang pokok-pokok kepegawaian*

Internet:

- <https://id.m.wikipedia.org>, 16/9/2018, 12:16 PM.
- <https://media.neliti.com>, 16/9/2018, 10:12 PM.
- <https://propam.polri.go.id>, 15/9/2018, 9:33 AM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Briptu Romianto (Kaminal Propam Polres Pelabuhan Makassar)



Wawancara dengan Briptu Indra Pratama (Baur Gakkum Polres Pelabuhan Makassar)



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 8 4 0 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8395/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepolres Pelabuhan Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-34207/SH.01/PP.00.9/09/2018 tanggal 02 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ISMUNITA**
Nomor Pokok : 10400114075
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 November s/d 03 Desember 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 November 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 3406 Tahun 2018
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Ismunita
NIM : 10400114075
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar."

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;

Mengingat : c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Dr. H. Kasjim, S.H., M. TH.I.
Penguji II : Ashar Sinilele, S.H., M.H.
Pelaksana : Muh. Amzar, S.Ag.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 19 November 2018
Dekan,


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B3675 /SH.01/PP.00.9/11/2018
Sifat : Penting
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata Gowa, 19 November 2018

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag (Ketua)
2. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Prof. Dr. H. Kasjim, S.H., M. TH.I. (Penguji I)
4. Ashar Sinilele, S.H., M.H. (Penguji II)
5. Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6 Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Ismunita
N I M : 10400114075
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 11.00-12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 2765 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca

: Surat Permohonan

Nama

: Ismunita

NIM

: 10400114075

Jurusan

: Ilmu Hukum

Hari/Tanggal

: Senin, 22 Oktober 2018

Prihal

: Ujian Seminar Proposal/Skripsi

Judul

: "Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Kode Etik POLRI terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar"

Menimbang

- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
- Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
- Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
- Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
- Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua

: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris

: Istiqamah, S.H., M.H.

Penguji I

: Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I.

Penguji II

: Ashar Sinilele, S.H., M.H

Pelaksana

: 1. Mujahidah, S.E

2. Nurhayati Wahid

Kedua

Ketiga

- : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa

Rada tanggal : Oktober 2018



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II. Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-3374 /SH.O1/PP.00.9/10/2018
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Proposal

Samata Gowa, Oktober 2018

Kepada Yth :

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I (Penguji I)
4. Ashar Sinilele, S.H., M.H (Penguji II)
5. Ahkam Jayadi, S.H., M.H (Pembimbing I)
6. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana.

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Ismunita
NIM : 10400114075
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2018
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 2177 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan

Nama : Ismunita
NIM : 10400114075
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 14 November 2018
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Di Polres Pelabuhan Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I
Penguji II : Ashar Sinilele, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
2. Herawati, S.H

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa
pada tanggal 12 November 2018

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No.63, Tlp. (0411) 864924 Fax (0411) 864924 Makassar
Kampus II. Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-3557/SH.O1/PP.00.9/11/2018
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, 12 November 2018

Kepada Yth :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. | (Ketua) |
| 2. Istiqamah, S.H., M.H. | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I | (Penguji I) |
| 4. Ashar Sinilele, S.H., M.H | (Penguji II) |
| 5. Ahkam Jayadi, S.H., M.H | (Pembimbing I) |
| 6. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Ismunita
NIM : 10400114075
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 November 2018
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 270/ Tahun 2018
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN 2018

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Ahkam Jayadi, S.H., M.H
2. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H. .

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Ismunita
NIM : 10400114057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Peranan Propam dalam Menegakkan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Serta Cara Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Makassar"

- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
d. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
Pada tanggal : 10 Oktober 2018
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa;

Nomor : B.3427/SH.01/PP.00.9/09/2018
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Samata Gowa, 2 Oktober 2018

Kepada Yth :
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Prov. Sul- Sel
Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ismunita
N I M : 10400114075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ IH
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok L 16 No. 15

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skipsinya :

"Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ahkam Jayadi, S.H., M.H
2. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Makassar, terhitung mulai tanggal 01 November 2018 s/d 03 Desember 2018.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa (Sebagai Laporan)

Riwayat Hidup Penulis



Ismunita Lahir di Balangtaroang 1 Desember 1996. Dari pasangan Muh. Amir. H dan Fitri, karena kepedulianya pada pendidikan, tidak pernah lepas dari dukungan dan do'a mereka untuk kami. Tanpa mengenal rasa lelah untuk selalu menjaga, mendidik dan menyayangi kami dengan penuh cinta dan kasih sayang, saya adalah anak Ketiga dari 4 bersaudara.

Mulai pendidikan di Sekolah SDN 63 Cilallang, Kecamatan Bulukumpa pada tahun 2003 tamat pada tahun 2008 melanjutkan studi di SMPN 14 Bulukumpa pada tahun 2008, tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di SMAN 2 Bulukumpa dan tamat pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

M A K A S S A R